

PRESS RELEASE

SEMINAR NASIONAL DALAM RANGKA HUT KE-31 BPKP

“PERAN PENGAWASAN INTERN

DALAM PENGAWALAN PEMBANGUNAN NASIONAL”

Senin, 19 Mei 2014, pk 08.00 -12.00 WIB

Aula Gandhi Timur , Lt 1. BPKP Pusat

BPKP, sejak lahirnya pada tanggal 30 Mei 1983 atau 31 tahun yang lalu, telah sangat berperan aktif dalam pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia. BPKP mempunyai peran, tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam membantu Pemerintah untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*, dan juga mendorong peningkatan kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara baik di Pusat maupun di Daerah.

Hasil pengawasan yang selama ini dilakukan BPKP, terefleksi menjadi empat perspektif akuntabilitas, yaitu: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan; Akuntabilitas Kebendaharaan dan Pengelolaan Aset Negara; Akuntabilitas Penyelamatan Keuangan Negara dan Terbangunnya Iklim bagi Terselenggaranya Kepemerintahan yang Baik dan Bersih; serta Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral. Dari hasil pengawasan BPKP tersebut, dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan April 2014 telah menghasilkan potensi penghematan Keuangan Negara sebesar Rp76,94 T.

Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat perlu dikawal mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya sehingga hasil pembangunan tersebut benar-benar ter *delivery* sampai kepada masyarakat.

Urgensi pengawalan pembangunan nasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik di pusat maupun daerah, memiliki peran sentral dalam mengawal agar indikator-

indikator makro yang telah ditetapkan dapat terealisasi, dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, seharusnya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas pembangunan nasional tersebut.

Selain pengawasan lintas sektoral yang merupakan *playing field* BPKP, BPKP juga harus mampu memberikan pendapat tentang keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Dalam hal ini tidak hanya dalam pencapaian target *output*, namun lebih pada *outcome* (dan juga *Impact*). Pada saat yang sama, APIP lainnya baik yang ada di K/L maupun di Daerah harus memberikan *fully support* dalam rangka mengawal pembangunan di kementerian/lembaga/daerahnya.

Di sisi lain, harus diakui bahwa hasil pengawasan yang telah dilakukan APIP selama ini belum terkomunikasikan dengan baik kepada para *stakeholders* (termasuk kepada masyarakat), terutama dalam konteks pengawalan pembangunan nasional. Untuk itulah, Seminar Nasional BPKP bertajuk “Peran Pengawasan Intern Dalam Pengawalan Pembangunan Nasional” ini dilaksanakan dengan menghadirkan tokoh birokrat, pakar komunikasi politik, pakar ekonomi makro, dan praktisi media massa sebagai narasumber. Pada seminar ini, juga diundang sebagai peserta adalah pejabat dari berbagai lembaga tinggi negara, Sekretaris Jenderal pada Kementerian/Lembaga, dan pejabat pemerintahan daerah (Provinsi).

Peraih penghargaan Socrates Award 2014 untuk kategori *Innovative City of The Future* bagi Kota Surabaya dan dua penghargaan terkait Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB, Walikota Surabaya Tri Rismaharini memberikan contoh konkret dalam penggunaan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung penerapan *good governance*. Antara lain inovasi berupa Penerapan *Government Resources Management System* (GRMS) dan *Single Window*.

Selanjutnya, Direktur *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia Dr. Hendri Saparini menjelaskan gambaran pencapaian target makro pembangunan Indonesia saat ini dan upaya pengawasan di tingkat makro yang dibutuhkan dalam rangka mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya.

Pakar Komunikasi Politik, Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A berbagi pengalaman mengenai strategi komunikasi BPKP dan APIP lainnya dengan *stakeholders* dalam upaya peningkatan peran dan fungsi pengawasan intern. Prof. Tjipta juga menjelaskan bagaimana seharusnya BPKP dan APIP lainnya mengomunikasikan perannya kepada publik dalam memenuhi amanah UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pelayanan Publik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pengawasan dalam mengawal pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Terakhir, Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo menyampaikan peran media massa untuk mendorong efektivitas peran APIP dalam mengawal pembangunan nasional, termasuk bagaimana membangun sinergi antara lembaga media massa dengan BPKP dan institusi APIP lainnya.

Melalui seminar nasional ini, diharapkan BPKP dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat mengoptimalkan perannya dalam mengawal pembangunan nasional sesuai dengan tema HUT ke-31 BPKP, yaitu **“Dengan Semangat PIONIR dan 5 As, Kita Tingkatkan Peran BPKP dalam Mengawal Pembangunan”**.

Bagian Humas dan HAL BPKP

Jl.Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120

Tel/Fax: 62218584985

www.bpkp.go.id, humas@bpkp.go.id

CP: Yan Eka Milleza, 081340797489

Harry Bowo, 08159918047

Sudarsari Sjamsoe, 08164846224